

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IX DPR RI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA DAN BELITUNG
MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2020-2021
11 APRIL – 15 APRIL 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, APRIL 2021**



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020 - 2021
TANGGAL 11 APRIL – 15 APRIL 2021

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan kesehatan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan Program-Program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja terkait dengan penanggulangan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah resesi ekonomi global saat ini.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI dalam penanggulangan pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

1.2 Dasar Kegiatan

1. Keputusan Pimpinan DPR-RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 – 2021.

2. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020 - 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan agenda pemulihan ekonomi nasional.
2. Menggali informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN di tengah-tengah pandemi COVID-19.
3. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI di tengah-tengah pandemi COVID-19.

1.4 Kegiatan

Kegiatan yang telah dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - b. Satgas Penanganan COVID-19 Bangka Belitung
 - c. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
 - e. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu
 - f. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagsel
 - g. Dirut RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno
 - h. Kepala Balai POM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - i. Kepala Perwakilan BKKBN Bangka Belitung
2. Peninjauan dan kunjungan ke RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno
3. Peninjauan dan kunjungan ke Balai Latihan Kerja

1.5 Peserta Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA.

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut:

NO	NO ANGG.	NAMA	JABATAN	FRAKSI	DAPII
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI IX	PKB	JATIM III
2.	A-177	TUTI NUSANDARI ROOSDIONO	Anggota	PDIP	JATENG I
3.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., MM	Anggota	PDIP	JATENG V
4.	A-200	Dr. DEWI ARYANI, M.Si	Anggota	PDIP	JATENG IX
5.	A-269	DELIA PRATIWI SITEPU, SH	Anggota	GOLKAR	SUMUT III
6.	A-276	Hj. SANIATUL LATIVA, SE	Anggota	GOLKAR	JAMBI
7.	A-134	Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL	Anggota	GERINDRA	SULBAR
8.	A-369	Drs. FADHOLI (KAPOKSI)	Anggota	NASDEM	JATENG I
9.	A-380	NURHADI, S.Pd	Anggota	NASDEM	JATIM VI
10.	A-27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.	Anggota	PKB	JATENG IX
11.	A-545	LINDA MEGAWATI, SE., M.Si	Anggota	DEMOKRAT	JABAR IX
12.	A-571	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	Anggota	DEMOKRAT	SULSEL I
13.	A-425	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si	Anggota	PKS	DKI JKT II
14.	A-429	dr. H. ADANG SUDRAJAT, M.M., Av.	Anggota	PKS	JABAR II
15.	A-499	Hj. INTAN FAUZI, SH., LLM	Anggota	PAN	JABAR VI
16.	A-521	MESAKH MIRIN, SKM	Anggota	PAN	PAPUA

II. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mengalami imbas pandemi COVID-19. Namun, pemulihan ekonomi Bangka Belitung telah dilakukan sejak tahun lalu hingga triwulan IV 2020. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,04% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 4,37% (yoy). Hal ini sejalan dengan mulai meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha seiring dengan mulai terbiasanya masyarakat dengan implementasi protokol COVID-19 sebagai bagian dari tatanan kehidupan baru.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi, dan pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM). Adapun konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam dan ekspor luar negeri tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada triwulan I 2021 diperkirakan akan tumbuh menguat dibandingkan triwulan IV 2020 didorong oleh membaiknya konsumsi masyarakat, membaiknya investasi dan meningkatnya kinerja ekspor luar negeri. Sektor lapangan usaha utama yaitu sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan dan perdagangan diperkirakan juga akan semakin membaik. Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung pada tahun 2021 diperkirakan meningkat dari tahun 2020 sebagai dampak pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2 Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah

dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang. Pemerintahan provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2001.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Sumatra Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatra Selatan.



Gambar 1. Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2.3 Kependudukan

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Bangka Belitung tercatat pada Bulan September 2020 sebanyak 1.455.678 jiwa. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak Tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penambahan sekitar 232.382 jiwa atau rata-rata sebanyak 2.328 jiwa setiap tahun. Dengan luas daratan 16.424, 14 Km², maka kepadatan penduduk Bangka Belitung sebesar 88,63 jiwa per km persegi.

2.4 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 sebanyak 1.097.261 orang, 67,70 persen diantaranya termasuk dalam angkatan kerja dan 32,30 persen adalah bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja dan pengangguran. Dari 67,70 persen angkatan kerja, sebanyak 96,38 persen adalah mereka yang bekerja sementara sisanya sebanyak 3,62 persen merupakan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat mengindikasikan seberapa besar penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah, pada 2019, TPAK di provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 67,70 persen, ini berarti bahwa 100 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas terdapat 67-78 orang yang termasuk dalam angkatan kerja atau sebanyak 67-68 orang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

BIDANG KESEHATAN

3.1 Umum - Anggaran

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung setelah sehari sebelumnya melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi dan Balai Latihan Kerja Industri. Pada rapat ini Wakil Gubernur Abdul Fatah, yang didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas DP3ACSKB menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Babel terkait kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung menyampaikan, pada saat ini, Provinsi Bangka Belitung termasuk ke dalam lima provinsi yang mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 dengan jumlah tempat pelayanan vaksinasi sekitar 160 lokasi.

Total alokasi APBN 2021 ditetapkan Rp9,98 triliun. Distribusi dari volume belanja tersebut masing-masing sebesar 30,96 % atau Rp3,9 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan 69,03% atau Rp6,89 triliun dialokasikan untuk dana transfer dan Dana Desa. Pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung juga melakukan *refocusing* dan realokasi belanja dilakukan pada awal tahun ini sebagai dukungan keberlangsungan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat. Terdapat kebijakan minimal delapan persen dari Dana Desa harus difokuskan untuk penanganan COVID-19 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa/Inmendesa Nomor 1 Tahun 2021.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealokasi anggaran sebesar delapan persen dari total Dana Desa (DD) untuk penanganan COVID-19. Besaran Dana Desa pada 2021 untuk 39 desa mencapai Rp47,3 miliar.

Adapun untuk realisasi anggaran di triwulan I Tahun 2021 di Provinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp2.053 miliar atau 21,3 persen dari total pagu Rp9.621,8 miliar. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung melakukan percepatan belanja berdasarkan langkah strategis pelaksanaan anggaran dilakukan pemerintah dari awal tahun untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, yaitu realisasi belanja pegawai Rp207,3 miliar atau 20,8 persen dari pagu. Realisasi belanja barang sebesar Rp162,7 miliar atau 14,3 persen dari pagu, realisasi belanja modal Rp83,4 miliar atau 11,4 persen dari pagu, dan realisasi

belanja bansos sebesar Rp2,5 miliar atau 49,3 persen dari pagu," katanya. Sementara itu, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan positif 10,6 persen dibandingkan triwulan I 2020 yang menunjukkan bahwa K/L berhasil mempercepat pelaksanaan anggarannya.

3.2 Penanganan Pandemi COVID-19

3.2.1 Kebijakan Penanganan Pandemi

Pertama, berdasarkan surat Nomor 440/0083.a/BPBD yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perihal Langkah Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi telah menyampaikan dan menggarisbawahi perlu dan pentingnya sinergitas antar pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Pengendalian Penyebaran COVID-19 dan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.
2. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 berbasis kearifan lokal dengan mengaktifkan Posko Kampung Tegep Mandiri.
3. Meningkatkan ketersediaan tempat atau ruang isolasi kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19.
4. Melakukan penguatan kedisiplinan dan konsistensi pelaksanaan Protokol Kesehatan pada seluruh elemen masyarakat.
5. Menerapkan pemberian sanksi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Kedua, dalam rangka penerapan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 dimulai pelaksanaan Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 di wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan dengan dilaksanakannya Operasi Yustisi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 ini kepatuhan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan terutama di ruang-ruang publik semakin meningkat dan dengan demikian penularan dan penyebaran COVID-19 pun bisa dikendalikan.

Ketiga, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tingkat mikro di 4 (empat) tempat, yakni 2 di Kabupaten Bangka Selatan, masing-masing di Desa Bencah dan Desa Delas, Kecamatan Air Gegas, dan 1 di Kabupaten Bangka yaitu di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Kelurahan Sinar Baru, Kecamatan Sungailiat, lalu 1 di Kabupaten Belitung, yaitu di Pondok Pesantren Daarul Arafah, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk.

Sebagai langkah taktis dan responsif dalam pengendalian COVID-19 pada klaster desa/kampung, klaster perumahan, dan klaster komunitas/perkumpulan/asrama/pesantren, PPKM mikro terbukti efektif dan efisien dalam upaya pengendalian, pemantauan, dan evaluasi penanganan COVID-19 sehingga COVID-19 tidak menyebar dan meluas. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 3 Februari 2021 tentang perlunya PPKM berskala mikro yang diterapkan mulai dari tingkat RT/RW, dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No 09 Tahun 2021 tertanggal 12 Februari 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu, hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No 04 Tahun 2021 tertanggal 19 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19.

Dari 4 tempat pelaksanaan PPKM mikro tersebut, capaian yang bisa disampaikan sebagai berikut:

- a. Terputusnya mata rantai penyebaran COVID-19 hingga di tingkat RT/RW dan desa/ kampung melalui deteksi dini (*early warning system*);
- b. Berhasil ditekannya penularan COVID-19 dan dampak kesakitan bahkan kematian di tingkat keluarga. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya penerapan Protokol Kesehatan;
- c. Terbangun dan bangkitnya kembali nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan solidaritas serta semangat gotong royong sesama warga masyarakat.

PPKM mikro adalah peningkatan kapasitas dari “Kampung Tangguh” yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri bernama “Kampung Tegap Mandiri” yang selama pandemi COVID-19 ini sudah berjalan, namun masih belum diimplementasikan dengan optimal, seperti halnya keberadaan dan peran Posko COVID-19 desa/kelurahan. Harapannya, ada revitalisasi dan penguatan eksistensi dari Posko COVID-19 atau Kampung Tegap Mandiri yang sudah ada, bahkan implementasinya sampai di tingkat RT/RW.

PPKM mikro ini adalah upaya memperbaiki kesiapsiagaan dan strategi penanggulangan COVID-19 di tingkat hulu. Melalui PPKM mikro, setiap desa/kelurahan didorong untuk mendirikan dan mengaktifkan Posko Tanggap

COVID-19 yang berperan sebagai pendamping tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/dinas kesehatan) serta petugas surveilans dan tim pelacak (*tracer*) penyebaran COVID-19.

Fungsi posko ini tidak hanya sekadar sebagai pusat informasi, namun juga bertugas untuk melakukan pencegahan (sosialisasi tentang COVID-19, penerapan Protokol Kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun, serta pembatasan mobilitas masyarakat); penanganan (3T: tracing, testing, treatment, pelayanan kepada masyarakat, dan penanganan dampak ekonomi melalui BLT Dana Desa); pembinaan (penegakan disiplin Protokol Kesehatan dan pemberian sanksi); dan pendukung (pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi).

3.2.2 Update Kasus COVID-19

Berikut disampaikan update kasus COVID19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 4 April 2021:

- Dinyatakan selesai isolasi & bebas COVID-19 : 8704 (bertambah 55)
 - Meninggal dunia COVID-19 : 160 (bertambah 2)
 - Dalam isolasi/perawatan : 789 (bertambah 60 – berkurang 57)
 - Kumulatif kasus konfirmasi : 9653 (bertambah 60)
 - Kelompok umur (tahun) :
 - < 1 : 38
 - 1 – 4 : 236
 - 5 – 14 : 964
 - 15 – 19 : 817
 - 20 – 44 : 4873
 - 45 – 54 : 1373
 - 55 – 69 : 1142
 - > 70 : 210
 - Jenis kelamin :
 - Laki-laki : 4723 (48,93%)
 - Perempuan : 4930 (51,07%)*

Adapun detail sebaran kasus konfirmasi, persentase, dan penambahan harian:

- Pangkalpinang : 3398/35,20% (bertambah 6)
- Bangka : 2359/24,44% (bertambah 16)
- Bangka Tengah : 1384/14,34% (bertambah 3)
- Bangka Barat : 471/4,88%
- Bangka Selatan : 484/5,01%
- Belitung : 968/10,03% (bertambah 35)
- Belitung Timur : 589/6,10%

3.2.2 Informasi Tentang Orang yang Selesai dan Masih Isolasi/Karantina

Disampaikan bahwa 55 (lima puluh lima) orang selesai menjalani isolasi dan karantina serta dinyatakan bebas dari COVID-19, yaitu:

- Kota Pangkalpinang : 30
- Kabupaten Bangka : 2
- Kabupaten Bangka Barat : 1
- Kabupaten Belitung : 22

Dengan 55 orang hari ini yang selesai menjalani isolasi, maka persentase tingkat orang yang selesai isolasi dan dinyatakan sehat dari COVID-19 di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan kemarin mengalami sedikit peningkatan yakni berada di angka 90,17%.

Disampaikan bahwa 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) orang masih atau sedang menjalani isolasi dan karantina, yaitu:

- Kota Pangkalpinang : 246
- Kabupaten Bangka : 94
- Kabupaten Bangka Tengah : 61
- Kabupaten Bangka Barat : 48
- Kabupaten Bangka Selatan : 65
- Kabupaten Belitung : 171
- Kabupaten Belitung Timur : 104

Dengan demikian, orang yang sedang atau masih dalam perawatan dan penanganan dibandingkan dengan kemarin maka hari ini kembali turun yakni 8,17%.

3.2.3 Informasi Tentang Orang yang Meninggal Dunia COVID-19

Disampaikan bahwa setelah kemarin 1 orang terkonfirmasi COVID-19 meninggal dunia di Kabupaten Belitung, hari ini diinformasikan 2 (dua) orang yang terkonfirmasi COVID-19 meninggal dunia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- Kota Pangkalpinang : 1
- Kabupaten Bangka : 1

Dengan demikian kematian orang yang terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi berjumlah 160 (seratus enam puluh) orang atau berada di angka 1,66%.

3.2.4. Informasi Tentang Orang yang Terkonfirmasi COVID-19*

Disampaikan bahwa 60 (enam puluh) orang dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, yaitu:

- Kota Pangkalpinang : 6
- Kabupaten Bangka : 16
- Kabupaten Bangka Tengah : 3
- Kabupaten Belitung : 35

Dengan penambahan 60 orang yang terkonfirmasi COVID-19 maka hal ini semakin mengafirmasi bahwa penyebaran dan penularan virus Corona belum berakhir, masih terus terjadi, dan faktanya wabah/virus ini ada di komunitas.

3.2.5 Informasi Tentang Situasi Dan Perkembangan di Wisma Isolasi & Karantina COVID-19*

1. Wisma Isolasi/Karantina Pangkalpinang (LPMP)

- Kapasitas Kamar : 48 tempat tidur
- Jumlah Penghuni : 3
- Penghuni Konfirmasi : 3
- Penghuni Suspek : 0
- Penghuni Kontak Erat : 0
- Sisa Kamar Tersedia : 45

2. Wisma Isolasi/Karantina Bangka

a. Mess Anggrek

- Kapasitas Kamar : 15 (22 tempat tidur)

- Jumlah Penghuni : 27
- Penghuni Konfirmasi : 22
- Penghuni Suspek : 5
- Penghuni Kontak Erat : 0
- Sisa Kamar Tersedia : 0

b. Mess Melati

- Kapasitas Kamar : 14
- Jumlah Penghuni : 13
- Penghuni Konfirmasi : 4
- Penghuni Suspek : 9
- Penghuni Kontak Erat : 0
- Sisa Kamar Tersedia : 1

3. Wisma Isolasi/Karantina Bangka Tengah

- Kapasitas Kamar : 37
- Jumlah Penghuni : 44
- Penghuni Konfirmasi : 40
- Penghuni Suspek : 4
- Penghuni Kontak Erat : 0
- Sisa Kamar Tersedia : 6

4. Wisma Isolasi/Karantina Bangka Selatan (BKPSDMD)

- Kapasitas Kamar : 29 (58 tempat tidur)
- Jumlah Penghuni : 23
- Penghuni Konfirmasi : 0
- Penghuni Suspek : 23
- Penghuni Kontak Erat : 0
- Sisa Kamar Tersedia : 14

5. Wisma Isolasi/Karantina Bangka Barat (BKPSDMD)

- Kapasitas Kamar : 16
- Jumlah Penghuni : 21
- Penghuni Konfirmasi : 19
- Penghuni Suspek : 2
- Penghuni Kontak Erat : 0
- Sisa Kamar Tersedia : 0

3.2.6 Informasi Tentang Monitoring Kepatuhan Penerapan Protokol Kesehatan
 Disampaikan bahwa berdasarkan monitoring kepatuhan dalam menerapkan Protokol Kesehatan yang dilakukan di 34 provinsi di Indonesia selama 1 pekan (23-28 Maret 2021) maka tingkat kepatuhan Protokol Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari 135 titik yang dipantau adalah sebagai berikut:

1. Angka Kepatuhan Memakai Masker: 84,38% dari 87,83% rerata nasional (mengalami penurunan dari pekan sebelumnya), dimana tingkat kepatuhan terendah berada di Kota Pangkalpinang dengan 66,96%.
2. Angka Kepatuhan Menjaga Jarak dan Menghindari Tempat Keramaian: 73,80% dari 86,78% rerata nasional (mengalami peningkatan dari pekan sebelumnya), dimana tingkat kepatuhan terendah berada Kabupaten Bangka Tengah dengan 50,00%.

Data di atas menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan dalam menerapkan Protokol Kesehatan 3M khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih rendah. Untuk itu, mari kita tingkatkan kedisiplinan dalam mematuhi Protokol Kesehatan. Pastikan bahwa dalam setiap kesempatan kita selalu disiplin dalam menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 yakni menggunakan masker, menjaga jarak dan sebisa mungkin menghindari kerumunan/keramaian, serta mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan mengurangi mobilitas

3.2.7 Informasi Tentang Peta Zona Risiko

Disampaikan bahwa berdasarkan analisis data mingguan COVID-19 dari tanggal 23 s.d 28 Maret 2021 maka sebaran peta zona risiko COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Zona Merah (Risiko Tinggi): Nihil (tidak ada)
- Zona Oranye (Risiko Sedang):
 - Kabupaten Bangka
 - Kabupaten Bangka Tengah
 - Kabupaten Belitung
 - Kabupaten Belitung Timur
 - Kota Pangkalpinang
- Zona Kuning (Risiko Rendah):
 - Kabupaten Bangka Barat
 - Kabupaten Bangka Selatan
- Kenaikan Kasus Tertinggi:
 - Kabupaten Bangka Barat : naik 4100% (1 vs 42)
 - Kabupaten Belitung Timur : naik 58,5% (41 vs 65)
 - Kabupaten Bangka : naik 0,0% (58 vs 58)
- Insiden Kumulatif Tertinggi (Per 100.000 Penduduk):
 1. Kota Pangkalpinang : 1466,25 kasus
 2. Kabupaten Bangka : 772,69 kasus
 3. Kabupaten Bangka Tengah : 698,67 kasus

Dari data tersebut maka jumlah kasus konfirmasi COVID-19 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pekan ke-4 bulan Maret 2021 mengalami penurunan sebesar 9,0% dibanding pekan sebelumnya, dimana 34,30% kasus positif COVID-19 berasal dari Kota Pangkalpinang. Adapun kenaikan kasus COVID-19 mengalami lonjakan terutama di Kabupaten Bangka Selatan dan Belitung Timur, dimana dari sebelumnya berada di zona hijau, kemudian bergerak ke zona kuning (Bangka Selatan), dan saat ini berada di zona oranye (Belitung Timur).

Sementara kasus kematian atau meninggal dunia akibat COVID-19 yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pekan ke-4 bulan Maret 2021 sama dengan pekan sebelumnya, dimana 23,21 kasus/angka kematian per 100.000 penduduk berasal dari Kota Pangkalpinang, disusul Kabupaten Bangka (10,98 kasus), dan Kabupaten Belitung (10,94 kasus).

3.3. Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19

Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus berupaya keras melakukan penanganan kesehatan terkait COVID-19, di sisi lain memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19 sekaligus melakukan pemulihan ekonomi akibat pandemi panjang COVID-19.

Dalam hal penanganan di bidang kesehatan terkait COVID-19, Satgas/Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini berfokus untuk

menyukseskan program vaksinasi massal COVID-19. Vaksinasi COVID-19 adalah upaya pemerintah untuk menangani COVID-19 secara berkelanjutan yakni **Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit**.

79 hari sudah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dan akan terus dilakukan sepanjang tahun 2021 untuk mewujudkan *Herd Immunity* atau kekebalan komunitas/kelompok dari serangan COVID-19, sekaligus diharapkan dapat mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona.

Melihat perkembangan positif dari vaksinasi gelombang pertama yang menyasar SDM kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang dituntaskan, dan untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi demi mencapai kekebalan kelompok secara lebih luas lagi, maka program vaksinasi kini memasuki sasaran kedua vaksinasi yakni bagi petugas pelayanan publik dan masyarakat lanjut usia (lansia).

Berikut disampaikan data terkait vaksinasi COVID-19 per 02 April 2021:

1. SDM Kesehatan: 13.134
 - Vaksinasi ke-1: 11.877 (90,43%)
 - Vaksinasi ke-2: 11.336 (86,31%)
2. Petugas Pelayanan Publik: 89.573
 - Vaksinasi ke-1: 22.823 (25,48%)
 - Vaksinasi ke-2: 13.681 (15,27%)
3. Lanjut Usia: 79.288
 - Vaksinasi ke-1: 9.944 (12,54%)
 - Vaksinasi ke-2: 653 (0,82%)
4. Calon Jamaah Haji: 26
 - Vaksinasi ke-1: 26 (100%)
 - Vaksinasi ke-2: -

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung membentuk tim percepatan vaksinasi COVID-19 sebagai gerak cepat pemerintah daerah mengendalikan dan memutus penyebaran virus corona itu. Pembentukan tim ini karena realisasi vaksinasi COVID-19 di masyarakat yang masih rendah. Masih ada beberapa pihak yang lambat merespon dan mengabaikan percepatan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat.

Pencapaian total sasaran vaksinasi di Bangka Belitung, secara keseluruhan sebanyak 182.035 jiwa. Dengan vaksinasi tahap satu baru mencapai 18.764 jiwa (10,31 persen). Hingga saat ini di Babel, vaksinasi bagi tenaga kesehatan sekitar 91 persen, sementara bagi pelayan publik sekitar 26 persen, dan usia lanjut 12 persen.

Saat ini masih ada kendala yang dihadapi, di mana pada pemberian vaksin tahap kedua terdapat 170 ribu lebih sasaran penerima vaksin, namun vaksin yang diterima oleh Babel baru sebanyak 94 ribu dosis. Sehingga pada tahap kedua, pelayan publik baru divaksin sekitar 28% dan lansia baru sebanyak 14% yang

menerima suntikan vaksin. Jika perhari dilaksanakan 100 vaksinasi di setiap tempat, maka diperkirakan akhir tahun dapat selesai untuk pencegahan penyakit COVID-19.

Percepatan vaksinasi dilakukan menjelang Ramadan dengan harapan para tokoh agama, masyarakat dan lansia dapat beribadah dengan baik selama bulan puasa Ramadhan. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan metode jemput bola dalam program vaksinasi COVID-19 untuk kelompok masyarakat lanjut usia dapat mempercepat program vaksinasi massal ini. Target utama yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lansia yang dapat divaksinasi di Masjid As-Salam Desa Kace mencapai 200 orang dan diharapkan vaksinasi berjalan lancar dan aktivitas segera kembali berjalan normal, tapi tidak mengabaikan protokol kesehatan.

3.4 RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H. C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibangun sejak tahun 2009 menggunakan dana APBN dan APBD dengan luas tanah 225.032 m² dan luas bangunan 30.111 m². Rumah sakit ini terletak di jalan zipur kawasan lintas timur desa air anyir kabupaten bangka. berjarak sekitar 18 km dari Kota Pangkalpinang dan 15 km dari Kota Sungailiat Bangka.

Dengan adanya pengembangan pola regionalisasi sistem rujukan dalam wilayah provinsi, berdasarkan SK Dirjen BUK nomor HK.02.03/i/0363/2015 tanggal 13 Februari 2015 serta Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 15 tanggal 12 Februari 2015 bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H. C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan Provinsi.

Sumber daya manusia (SDM) yang telah disediakan oleh RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sudah semakin memadai dan akan terus berkembang dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era persaingan antar rumah sakit.

Sumber daya manusia yang dimiliki terdiri dari berbagai macam disiplin ilmu dan status kepegawaiannya seperti terinci dalam tabel berikut :

No	Jenis Tenaga	PNS	Non PNS	Jumlah
1	Medis	32	12	44
2	Paramedis Keperawatan	143	49	192
3	Paramedis Non Keperawatan	58	38	96
4	Non Medis	27	78	105
	Jumlah	260	177	437

Pada tahun 2016 jumlah keseluruhan tenaga kerja di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno adalah sekitar 437 orang yang terdiri dari 22 dokter spesialis, 18 dokter umum, 4 dokter gigi, 192 (tenaga perawat dan bidan), 20 tenaga farmasi, 18 tenaga kesehatan masyarakat, 8 tenaga gizi, 7 tenaga terapi fisik, 43 tenaga

keteknisan medis dan 105 tenaga non kesehatan lainnya. Komposisi terbanyak adalah tenaga kesehatan sebanyak 332 orang dan non kesehatan sebanyak 105 orang.

Adapun perkembangan komposisi tenaga SDM selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jenis Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Ketenagaan Berdasarkan Pendidikan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Tenaga Kesehatan				
1	Dokter Spesialis	10	18	22
2	Dokter Spesialis	15	21	18
3	Dokter PTT dan Magang	-	-	-
4	Dokter Gigi dan dokter gigispesialis	4	4	4
5	Tenaga Kefarmasian	21	22	20
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	16	17	18
7	Tenaga Perawat dan Bidan	214	198	192
8	Tenaga Teknis Medis	34	37	43
9	Tenaga Terapi Fisik	6	7	7
10	Tenaga Gizi	10	9	9
	Jumlah	330	333	332
Tenaga Non Kesehatan				
11	Pasca Sarjana	4	4	4
12	Sarjana	8	8	14
13	Sarjana Muda	29	28	14
14	SLTA	46	53	56
15	SLTP & SD Ke Bawah	1	1	1
	Jumlah	88	94	105
	TOTAL	418	427	437

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satu upayanya yaitu, memperjuangkan adanya fakultas kedokteran di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno dengan melakukan kerja sama dengan Universitas Sriwijaya Palembang.

Luas lahan RS ini kurang lebih 1,05 hektare. Mampu menampung 100 tempat tidur yang terdiri dari 25 tempat tidur ICU dan 75 untuk perawatan isolasi. Sementara itu, proses pembangunan memakan waktu 45 hari.

"Pembangunan dilakukan melalui upaya kolaboratif antar Kementerian/Lembaga. Mulai dari Kementerian PUPR yang didelegasikan kepada Kementerian Kesehatan dan beberapa BUMN terkait," kata Kepala BNPB itu.

"Sehingga seluruh proses dapat dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kolaborasi sudah menjadi program nasional karena penanganan kedaruratan tidak bisa berdiri sendiri," katanya.

Selain itu, lanjut Doni, seluruh proses pengembangan mulai perencanaan juga melibatkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai dengan operasionalnya. Dia mengatakan, RS tersebut dibangun menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB

Rumah sakit ini mulai beroperasi 21 Januari 2021, sekarang sudah ada pasien 10 orang alih rawat dari Wisma Karantina BKPSDMD Babel dan Asrama Haji Karantina Babel

3.5 Pelayanan BPJS Kesehatan

Hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatatkan jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 1.158.663 penduduk atau 87,3% dari total penduduk dan dua kabupaten telah meraih predikat cakupan kesehatan semesta yaitu Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Lebih dari 87% penduduk Bangka Belitung telah terlindungi JKN-KIS. Capaian *Universal health Coverage* (UHC) hingga saat ini mencapai 87,3% penduduk dengan 80,14% kepesertaan aktif. Ini menunjukkan dukungan dan komitmen yang besar terhadap penyelenggaraan Program JKN-KIS

3.6 Penanganan Stunting

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi balita stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 23,37 persen, dan ini menurun dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013, yaitu 28,66 persen. Adapun untuk balita wasting (kurus) berdasarkan hasil Riskesdas 2013, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk kategori serius, yaitu 10-14 persen berdasarkan WHO, 2010. Namun, berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensinya menurun menjadi 9,87 persen.

Penanganan stunting telah dan terus dilakukan sesuai dengan strategi nasional percepatan pencegahan stunting yaitu dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik, meluaskan dan menajamkan intervensi sensitif secara integrasi, menguatkan sistem surveilans gizi, meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga, khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak, dan gizi, serta merespons cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Surveilans Gizi, disebutkan bahwa surveilans gizi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan indikator pembinaan gizi melalui proses pengumpulan data, analisis, dan aksi. Melalui sistem informasi yang terekam dalam aplikasi e-PPBGM bisa dimanfaatkan untuk monitoring dan evaluasi. Data terkait dapat dijadikan dasar formulasi, modifikasi, dan aplikasi kebijakan program intervensi secara nasional, terutama dalam pelaksanaan program strategi penanggulangan stunting secara nasional oleh kesehatan dan lintas sektor.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

3.1 Upah Minimum

Upah Minimum (UMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ditetapkan dan disahkan oleh Gubernur pada tanggal 1 November 2020 berdasarkan Berita Acara Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 001/Depeprov/X/2020 tanggal 27 oktober

2020. Adapun mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 berpedoman pada :

- a. PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
- b. Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 4/1083/HK.00.00/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penyampaian Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19)
- c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2021 sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020, sebesar Rp. 3.230.023,66

Terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berkenaan dengan penetapan Upah Minimum Provinsi baru disosialisasikan pada bulan Maret 2021. Namun secara umum yang menjadi kewenangan dan tugas Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal penentuan upah minimum saat ini terkait dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam bentuk surat rekomendasi. Perumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan berdasarkan musyawarah secara mufakat.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Bangka Belitung tahun 2022 terkait UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan dengan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta masih menunggu petunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di perusahaan secara umum telah sesuai dengan Upah Minimum (UM) yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun di lapangan masih ditemukan beberapa pekerja dengan upah di bawah UMP. Berkaitan dengan kesiapan dalam menjalankan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru pada tahap sosialisasi.

Upah Minimum (UM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberlakukan sistem 1 (satu) upah. Hal ini berdasarkan kesepakatan antara Dinas yang membidangi ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Pengupahan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, LKS Tripartit se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SPSI serta APINDO

3.2 Outsourcing

Kondisi terkait ketenagakerjaan khususnya untuk penyerahan pekerjaan ke pihak lain, baik pemborongan pekerjaan ataupun penyedia jasa tenaga kerja selama ini berpedoman pada UU no 13 tahun 2003. Kondisi perusahaan saat ini, rata-rata telah sesuai dengan ketentuan, hanya beberapa terkait kewajiban pelaporan dan pencatatan mengenai outsourcing di dinas ketenagakerjaan yang

masih kurang terpenuhi. Dan sejak diterbitkannya UU no 11 tahun 2020 dan PP turunannya yaitu PP no 35 tahun 2021, tentu saja beberapa hal banyak mengalami perubahan terkait pelaksanaan alih daya di perusahaan.

Adapun yang menjadi permasalahan pekerja outsourcing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 (3 Kasus) berkaitan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dikarenakan perusahaan alih daya kalah tender, sedangkan perusahaan yang memenangkan tender tidak menggunakan seluruh pekerja, Hal ini dikarenakan adanya pengurangan kebutuhan akan pekerja dari perusahaan vendor. Sedangkan untuk permasalahan-permasalahan lain seperti ketidakpastian kontrak kerja, perjanjian kerja yang tidak dilaksanakan dan upah tidak dibayar belum ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyelesaian permasalahan pekerja/buruh outsourcing, Mediator Hubungan Industrial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada aturan yang ada. Namun sebelum masuk tahap mediasi, Mediator Hubungan Industrial Provinsi Belitung melakukan pendekatan-perdekatan secara personal terhadap pihak yang terkait.

3.3 Hubungan Industrial

Secara umum kondisi Hubungan Industrial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harmonis, meskipun masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait tenaga kerja. Namun masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di provinsi ini tetap mengacu pada UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Permenaker No 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Mediator Hubungan Industrial dan Tata Cara Mediasi, namun Mediator Hubungan Industrial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap melakukan pendekatan-pendekatan agar perselisihan diselesaikan secara kekeluargaan.

REKAPITULASI DATA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2020 PROVINSI BANGKA BELITUNG

NO	JENIS KEGIATAN	AKUMULASI S.D TAHUN LALU (2019)	JUMLAH 2020	
			PENAMBAHAN	JUMLAH
1	HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	1. LK BIPARTIT	33	12	45
	2. LKS TRIPARTIT	5	0	5
	3. SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH (SP/SB)	10880	0	10880
	4. FEDERASI SP/SB	49	0	49
	5. KONFEDERASI SP/SB	2	0	2
	6. ANGGOTA ORGANISASI PENGUSAHA (APINDO/KADIN)	65	0	65

	7. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU	309	214	523
	8. PERATURAN PERUSAHAAN (PP)	96	25	121
	9. PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)	13	15	28
	10. IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA TENAGA KERJA	35	8	43
	11. PERJANJIAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	45	28	73
	12. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN	35	19	54
2	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	1. HAK	75	9	84
	2. KEPENTINGAN	15	2	17
	3. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)	295	254	549
	4. ANTARA SP/SB DALAM SATU PERUSAHAAN	0	0	0
	5. MOGOK KERJA/UNJUK RASA	0	0	0
	6. LOCK OUT	0	0	0

3.4 UPTD Balai Latihan Kerja

Peran dan tanggungjawab Disnaker terkait program revitalisasi BLK dan Pengembangan Latihan Kerja:

1. Revitalisasi Balai Latihan Kerja, baik menyangkut personel atau instruktur, peralatan, program dan manajemen pada Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Rencana anggaran pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur BLK.

Dukungan pemerintah daerah dalam upaya program revitalisasi BLK dan Pengembangan Latihan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan adanya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota serta pengembangan dan pemasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Anggaran APBD setiap tahunnya.

Mekanisme pelaksanaan program revitalisasi BLK dan Pengembangan Latihan Kerja di Kepulauan Bangka Belitung:

- 1) Perencanaan Program Pelatihan pada BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfokus pada identifikasi kebutuhan pelatihan telah dilaksanakan sesuai alokasi dana proyek yang tersedia.
- 2) Pengembangan Program Pelatihan pada BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfokus pada kerjasama pelatihan eksternal dengan Lembaga/Instansi lain dan Masyarakat
- 3) Pelaksanaan Program Pelatihan pada BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis masyarakat
- 4) Evaluasi Pelatihan pada BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa penilaian pelayanan pelatihan penilaian Lembaga/Instansi lain dan Masyarakat baik

- 5) Dukungan revitalisasi pelatihan pada Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Permasalahan program revitalisasi BLK dan Pengembangan Latihan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Dukungan peralatan pelatihan yang kurang mengikuti perkembangan Teknologi
2. Belum adanya Insfrastruktur workshop pertanian, bangunan dan Telematika yang menjadi kebutuhan pencari kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Belum terbentuk LSP di BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Sarana dan prasarana pendukung bagi peserta pelatihan

Upaya pembenahan program revitalisasi BLK dan Pengembangan Latihan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni dengan membentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) dalam rangka menyiapkan lulusan yang siap kerja dan dibutuhkan oleh pasar kerja.

**DAFTAR USULAN REVITALISASI PERALATAN
PADA UPTD BALAI LATIHAN KERJA
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA KEJURUAN	NAMA SUB KEJURUAN	NAMA PERALATAN	JUMLAH
I.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Office Tools, Graphic Design, Multimedia, Technical Support.	Komputer (Pc/Laptop)	18 unit
			Printer A3	2 unit
			Solvent Printer	2 Unit
			UV Printer	2 Unit
II.	TEKNIK MANUFAKTUR	Mesin Produksi, CNC.	CNC	2 Unit
			Mesin Bubut	6 Unit
			Mesin Frais	6 Unit
			Mesin Sekrap	1 Unit
			Mesin Potong (Gergaji) otomatis	2 Unit
			Digital Laser Cutting Macine	1 Unit
III.	TEKNIK LAS	Las Industri	Mesin Las SMAW Digital	5 Set
			Mesin Las Portable	4 Set
			Bending Mesin Pipa	1 Set
			Mesin Tekuk Plate Hydraulic CNC	1 Set
			Mesin 3 IN 1, Potong, Tekuk dan Roll Plate	1 Set

			Mesin Las GTAW	4 Set
			Mesin Blander (gas)	2 Set
IV.	TEKNIK OTOMOTIF	Teknik Kendaraan Ringan	Mesin Vacuum, Pengisian Freon AC	1 Unit
			Ultrascan P1 Hanatech Adaptor Asian Europe Package	1 Set
			Unit Engine +Stand M/T Life 4 Tak 1300 cc	4 Unit
			Unit Mobil Bensin M/T 1300 cc Injeksi	2 Unit
			Unit Mobil Bensin A/T 1300 cc Injeksi	2 Unit
		Teknik Sepeda Motor	Unit Sepeda Motor 4 Tak A/T 110 cc Radiator	2 Unit
			Unit Engine +Stand A/T Life 4 Tak 150 cc	2 Unit
			Unit Engine +Stand M/T Life 4 Tak 150 cc	2 Unit
			Scanner Sepeda Motor Universal	1 Set
			Scanner Sepeda Motor Yamaha	1 Set
			Scanner Sepeda Motor Honda	2 Set
			Scanner Sepeda Motor Suzuki	2 Set
			Ultrasonic Injector Clearing & Tester	1 Set
			Tachnometer Infrared Digital	2 Set
			Special Service Tools (SST) Sepeda Motor	2 Set
V.	TEKNIK LISTRIK	Instalasi Penerangan	Mobil MTU (Lengkap dengan kelengkapan)	1 Unit
			Multimeter Analog 0 - 1000 V	16 Buah
			Multimeter Digital 0 - 1000 V	16 Buah
			Megger meter Digital 1000 V	16 Buah
			Fase meter 380 - 400 VAC	16 Buah
			Earth tester Digital PDR 200 DB	16 Buah
			Voltmeter AC BU 500 V	16 Buah
			Ampere meter AC BU 500 V	16 Buah
			Bor Tangan	4 Unit

VI.	REFRIGERATION	Teknik Tata Udara	Tube Cutter	16 Buah
			Tube bender	16 Buah
			Flaring Swaging Tool	16 Buah
			Kunci Shock	16 Set
			AC Split	4 Unit
			Kulkas	4 Unit
			Showcase	4 Unit
			Mesin 3 R	4 Unit
			Mesin Vacum	4 Unit
			Mesin Steam AC	4 Unit
			Tool Box	16 Set
			Alat las Oksigen	4 Unit
			Bor Tangan	4 Unit
			Multimeter Analog 0 - 1000 V	16 Buah
VII.	BANGUNAN	Furniture, Gambar Bangunan	Laptop standard untuk Gambar Bangunan	18 unit
			LCD In Focus Proyektor	1 Unit
			Mesin bor Wireles untuk Alumunium	8 Unit
			Mesin Potong Untuk Alumunium	8 Unit
			Pemotong Kaca	8 Unit
			Mesin Gerinda	8 Unit
			Gunting Baja Ringan	8 Unit
			Theodolit	1 Unit
			Waterpass	1 Unit
			GPS	2 Unit
			Meteran Roll 50 m	2 Buah
VIII	GARMEN APPAREAL	Menjahit	Mobil MTU (Lengkap dengan kelengkapan)	1 Unit
			Mesin Jahit Portable	16 Unit
			Mesin Obras Portable	4 Unit
			Mesin Obras Highspeed	16 Unit
			Mesin Bordir Komputer Besar	2 Unit
			Mesin Jahit Overdec	4 Unit
			Mesin Pasang Kancing	4 Unit
			Mesin Lobang Kancing	4 Unit
			In Focus	1 Unit
IX.	PARIWISATA	Perhotelan	Wardrobe	2 Unit
			Mini Refrigerator	2 Unit
			Vacuum Cleaner	1 Unit
			Floor Machine	1 Unit
			PA Trolley	1 Unit
			Roomboy Trolley Chart	1 Unit
			Mesin Cuci Manual	1 Unit
			Mesin Cuci Otomatis	1 Unit
			Mesin Pengereng	1 Unit

			Setrika Uap	1 Buah
			Setrika Manual	1 Buah
			F&B Trolley	1 Unit
			Room Service Trolley	1 Unit
			Refrigerator	1 Unit
			In Focus	1 Unit
X.	PROCESSING	Pengolahan Hasil Pertanian	Meja Kerja (Working Table)	4 Unit
			Frezzer/Lemari Es	1 Unit
			Oven Gas	2 Unit
			Oven Listrik	1 Unit
			Kompor Gas	4 Set
			Steamer/Pengukus Besar	1 Unit
			Blender	2 Unit
			Mixer Stand	1 Unit
			Penggiling Adonan mi/ Molen	1 Unit
			Penggiling Daging/ Umbi-umbian	2 Unit
			Small Vegetable Knife	6 Set
			Bread Knife	2 Set
			Carving Knife	16 Set
			In Focus	1 Unit
XI.	KIOS 3in1	-	Komputer PC	3 unit
			Meja Kerja	3 Unit
			Display LCD/TV LED 48" + Assesories	1 Unit
			In Focus	1 Unit
			Printer Colour A3	1 Unit

V. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan dan dialog yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, berikut adalah beberapa rekomendasi Komisi IX DPR RI:

BIDANG KESEHATAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga Komite Penanganan COVID-19 dan PEN untuk terus meningkatkan implementasi protokol kesehatan oleh masyarakat.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan percepatan pelaksanaan program Vaksinasi COVID-19, termasuk pemetaan kebutuhan logistik dan SDM vaksinasi di daerah.
3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan RI guna melakukan langkah-langkah percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 dan 2021 baik tenaga kesehatan pusat dan daerah.

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan untuk segera mengambil langkah strategis untuk membayar klaim pelayanan COVID-19 rumah sakit termasuk mengatasi permasalahan dispute klaim.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk terus melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengisian klaim pelayanan COVID-19 oleh rumah sakit guna meminimalisir tingginya kasus berkas tidak sesuai dan mempercepat proses verifikasi klaim.
6. Komisi IX DPR RI mendukung penuh upaya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dibangunnya fakultas kedokteran di RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno.
7. Komisi IX DPR RI mendukung penuh dan mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU tentang Daerah Kepulauan guna percepatan pembangunan kesehatan di daerah kepulauan.
8. Komisi IX DPR RI terus mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerjasama untuk percepatan penanganan stunting sehingga mencapai target nasional.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan penurunan perekonomian secara global termasuk pekerja. Untuk itu, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan segala upaya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Selain itu, program pemulihan ekonomi bagi pekerja seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU) maupun Kartu Prakerja agar dilaksanakan tepat sasaran dan bermanfaat dalam mempertahankan ekonomi pekerja.
2. Keberadaan BLK begitu strategis dan sangat dibutuhkan oleh pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI mendukung program revitalisasi UPTD BLK dan Pengembangan Latihan Kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk bisa menindaklanjuti dan mengupayakan pemenuhan/bantuan berbagai daftar usulan revitalisasi peralatan pada UPTD BLK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Amanat UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS terutama BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini belum berjalan dengan baik. Dari pihak perusahaan, belum semua perusahaan mendaftarkan kepesertaan pekerjanya. Pemerintah pun belum melaksanakan pengawasan dan sosialisasi keseluruhan perusahaan sementara pekerja, belum mengetahui keuntungan atas jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasar hal tersebut di atas, Komisi IX DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPJS Ketenagakerjaan serta instansi terkait lain untuk berkoordinasi dan memberi perhatian akan pentingnya jaminan social bagi Pekerja, sehingga

peningkatan kepesertaan dapat optimal terutama dengan dukungan Instruksi Presiden No 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Pekerja.

5. Perluasan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang masih belum optimal perlu dukungan semua pihak, agar pemberi kerja dan pekerja yang belum menjadi peserta baik dengan alasan belum tersosialisasi maupun karena belum membutuhkan dapat segera di daftarkan. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan pendekatan kepada Pemerintah Provinsi dan seluruh stakeholder terkait untuk memberikan dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

VI. PENUTUP

Demikian Lapotan Kungkungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini kami sampaikan. Semoga menjadi bahan perbaikan kebijakan kesehatan dan ketenagakerjaan di Pemerintah Pusat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 April 2021

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA TIM,**

Dr. NIHAYATUL WAFIROH, MA.

A-35